ANGGOTA DPD RI KUNJUNGI OMBUDSMAN RI PERWAKILAN ACEH

Rabu, 07 Februari 2018 - Anita Widyaning Putri

Banda Aceh, - Ombudsman RI Perwakilan Aceh menerima kunjungan Anggota DPD RI dari Komite III, Rafli Kande yang diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr. Taqwaddin Husin pada hari Senin 05 Februari 2018. Dalam pertemuan ini juga turut hadir Sayuti Aulia selaku Ketua Kobar-GB Aceh.

Pada pertemuan tersebut yang berlangsung selama satu jam lebih mereka membahas beberapa persoalan laporan yang disampaikan ke Ombudsman oleh masyarakat, khususnya terkait bidang kerja Komite III DPD RI yaitu bidang pendidikan. Yang dilaporkan yaitu masalah guru K2 sampai saat ini belum ada kejelasan. Bahka ada sebahagian CPNS K2 yang sudah mendapatkan penetapan NIP namun tdk jelas sampai sekarang status kepegawaian mereka dengan alasan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena mengajar di sekolah swasta, padahal SK nya dari pejabat pembina kepegawaian daerah kata Taqwaddin menyampaikan kepada Rafli.

Rafli selaku anggota Komite III DPD RI katanya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya para guru K2 yang telah lama berjuang, kemungkinan DPD akan duduk bersama dg multi pihak membahas masalah ini khususnya dengan Menpan-RB dan BKN.

Selanjutnya Sayuti Aulia selaku Ketua Kobar-GB Aceh juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua yang mempunyai permasalahan sama seperti Aceh akhirnya selesai setelah Gubernurnya datang langsung menjumpai Menpan-RB membahas masalah tersebut, oleh karenanya Sayuti berharap masalah ini dapat segera diselesaikan.

Selain membahas masalah di atas, pertemuan tersebut juga membahas masalah Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) yang belum ada kejelasan untuk dipindahkan ke Aceh. Padahal wilayah kerja BBTNGL lebih luas di Aceh, makanya masyarakat berharap supaya kantornya pindah ke Aceh sehingga segala pengurusan administrasi baik oleh masyarakat atau mahasiswa yang akan melakukan penelitian akan lebih mudah sambung Taqwaddin. Selanjutnya mereka juga membahas mengenai BPJS yang sampai saat ini belum memiliki Kantor Regional di Aceh. Kita masih tunduk ke Sumatera Utara sehingga semua proses menjadi terlambat, seperti proses klaim keuangan, jadi prosesnya harus ke Medan dulu. Oleh sebab itu kita juga berharap agar BPJS punya Kantor Regional sendiri di Aceh ujar Taqwaddin.

Terkait ketiga masalah tersebut Dr Taqwaddin akan mengagendakan pertemuan dengan Gubernur Aceh, karena bagaimanapun gubernur adalah perpanjangan pusat di daerah. Sehingga, upaya perjuangan dan komitmen Irwandi Yusuf sangat diharapkan agar permasalahan di atas segera diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Demikian ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh.